



DISDAG
KOTADUMAI

www.dagangdumai@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**

LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA DUMAI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu-isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	7
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan dan sasaran	12
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERDAGANGAN	20
A Capaian Kinerja Dinas Perdagangan	20
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	22
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra	33
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	36
3.5 Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	37
3.6 Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	43
3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45

3.8	Prestasi dan Penghargaan	47
B	Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP		51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan pada Tahun 2024	xiii
Tabel 2	Program Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024	xiv
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024	xiv
Tabel 4	Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	xv
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024	xvii
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024	xviii
Tabel I.1	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2021-2026	13
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Tahun 2024	14
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Dumai	16
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2024	17
Tabel II.5	Program Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024	18
Tabel II.6	Perubahan Program Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024	19
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	22
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	26
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	36
Tabel III.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	43
Tabel III.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel III.7	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perdagangan Tahun 2024	47
Tabel III.8	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2	Cascading Kinerja	6
Gambar 3	Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan	7
Gambar 4	Misi Dinas Perdagangan Kota Dumai	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKIP ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perdagangan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Perdagangan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perdagangan.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perdagangan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perdagangan Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Perdagangan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, Desember 2024

PLT. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA DUMAI



SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19681025 199002 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, maka sebagai unsur teknis, Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perdagangan Kota Dumai menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
- f. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perdagangan melaksanakan MISI yang ke 1 dan ke 2 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu misi 1 “ **Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri** “ dan Misi 2 “ **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu**” dan SASARAN yang ke 1.1 dan 2.3 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu 1.1 “ **Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah** “ dan 2.3 “ **Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai** ”

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 7 (Tujuh) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
1. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Sub kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
2. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- III. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Sub kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Sub kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- IV. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota
- Sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota
- Sub kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota
- V. Program Pengembangan Ekspor
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- VI. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
- Sub kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
- Sub kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- VII. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Sub kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan pada Tahun 2024 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74 %
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran	6370,72 M
		Capaian Pelayanan Tera / Tera Ulang Kemetrolgian	20,43 %
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera / Tera Ulang Kemetrolgian	76,58 %
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	14,62 %
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	20 %
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	7 Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Perdagangan Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.823.900.348 (*sebelas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 7 (tujuh) Program Kerja antara lain :

Tabel 2
Program Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.550.160.713	APBD
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.857.100.375	APBD
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.779.000	APBD
5.	Program Pengembangan Ekspor	158.000.000	APBD
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	243.624.500	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	180.946.900	APBD
J U M L A H		Rp. 10.278.611.488	APBD

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Program kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.394.394.573	APBD
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.458.155.375	APBD
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.779.000	APBD
5.	Program Pengembangan Ekspor	158.000.000	APBD
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	343.624.500	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	180.946.900	APBD
J U M L A H		Rp. 11.823.900.348	APBD

Dinas Perdagangan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74 %	14,43 %	97,90 %	√			
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran	6.370,72 M	7.775,00 M	122,04 %	√			
		Capaian Pelayanan Tera / Tera Ulang Kemetrolgian	20,43 %	21,63 %	105,87 %	√			
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera / Tera Ulang Kemetrolgian	76,58 %	137,39 %	179,41 %	√			
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	14,62 %	13,67 %	93,51 %	√			
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	20 %	19 %	95 %	√			
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	100 %	100 %	√			
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) yaitu **SANGAT BERHASIL**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.823.900.348 (*sebelas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 11.536.996.648 (*sebelas milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 286.903.700 (*dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	11.536.996.648
2. Belanja Modal	:	Rp.	286.903.700
Jumlah	:	Rp.	11.823.900.348

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	14,74 %	14,43 %	97,90 %	55.000.000	46.840.000	85,16 %
Program Pengembangan Ekspor	Persentase volume ekspor	6.370,72 Milyar	7.775,00 Milyar	122,04 %	158.000.000	150.499.400	95,25 %
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang ditera / tera ulang dan dilakukan pengawasan / penyuluhan	20,43 %	21,63 %	105,87 %	273.990.500	239.682.083	87,48 %
		76,58 %	137,39 %	179,41 %	69.634.000	67.429.301	96,83 %
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	14,62 %	13,67 %	93,51 %	180.946.900	142.369.840	78,68 %
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	20,00 %	19 %	95 %	3.458.155.375	2.614.064.014	75,59 %
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	100,00 %	100 %	100 %	34.890.000	13.623.000	39,05 %
		7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %	198.889.000	117.704.550	59,19 %

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKATEFISIENSI		KET
1.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	97,90 %	85,16 %	1,15	Efisien	-
		Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran	122,04 %	95,25 %	1,29	Efisien	-
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian	105,87 %	87,48 %	1,21	Efisien	-
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian	179,41 %	96,83 %	1,86	Efisien	-
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	93,51 %	78,68 %	1,19	Efisien	-
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	95 %	75,59 %	1,26	Efisien	-
2.	Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	39,05 %	2,56	Efisien	-
		Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	100 %	59,19 %	1,69	Efisien	-

Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,15 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (97,90%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun

- 2024 (85,16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
2. Pada *Indikator Kinerja Utama Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (122,04%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (95,25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
 3. Pada *Indikator Kinerja Utama Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,21 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (105,87%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (87,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
 4. Pada *Indikator Kinerja Utama Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,86 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (179,41%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (96,83%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
 5. Pada *Indikator Kinerja Utama Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,19 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (93,51%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (78,68%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

6. Pada *Indikator Kinerja Utama Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,26 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (75,59%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

7. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting* persentase tingkat efisiensinya adalah 2,56 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (39,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

8. Pada *Indikator Kinerja Utama Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,69 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (59,19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Daerah Kota Dumai No 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Perdagangan Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perdagangan Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

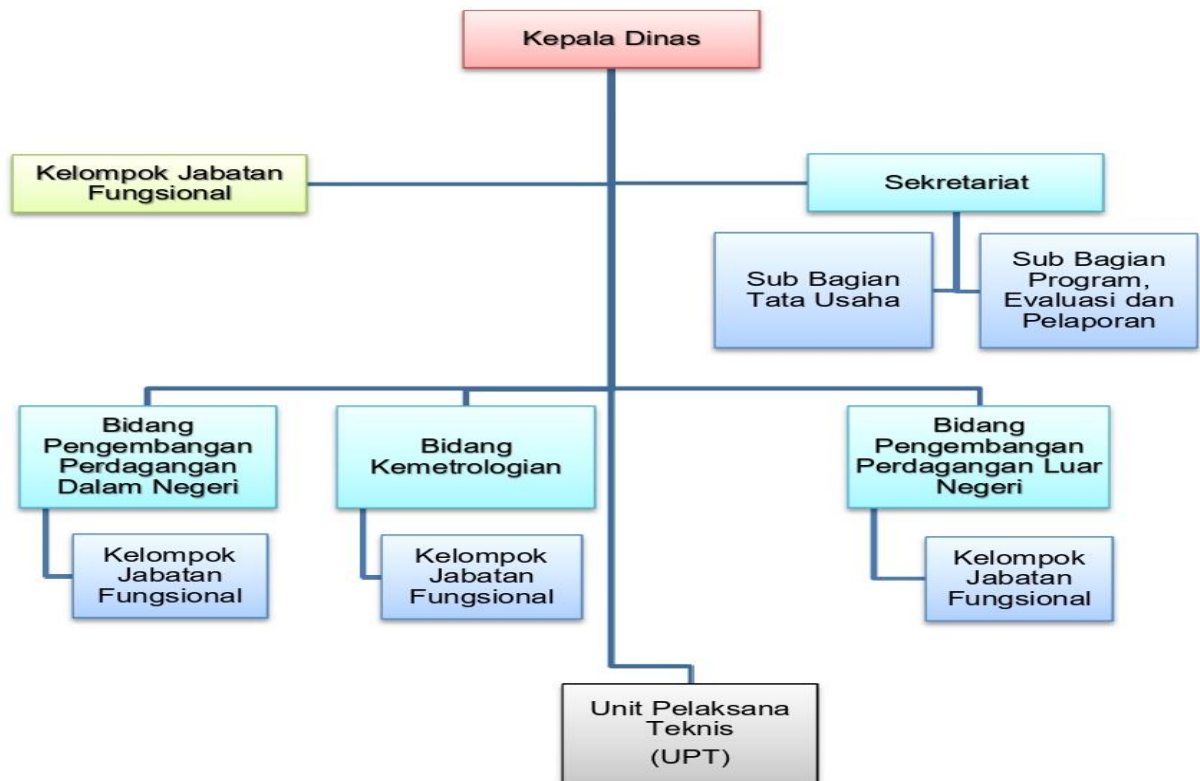
- 1 Perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 2 Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;

- 3 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 4 Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 5 Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - Subbagian Tata Usaha
 - Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Kemetrolagian:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPT

Gambar 1
Struktur Organisasi



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan pembangunan sektor perdagangan yang perlu ditangani sbb:

1. Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumber daya lokal berdaya saing global.
2. Belum lancarnya jalur distribusi barang kebutuhan bahan pokok masyarakat yang datang dari luar propinsi riau.
3. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi.
4. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat-alat UTTP.
5. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan.
6. Tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat
7. Pentingnya memanfaatkan jaringan perdagangan antar pulau untuk memperluas jaringan perdagangan pasar domestik
8. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang kecil.
9. Belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional.
10. Belum optimalnya penataan pedagang kakilima dan asongan.
11. Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor (lapangan usaha) pembentuk PDRB.
12. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.
13. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis.
14. Kurang memadainya pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perdagangan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 2
Cascading Kinerja**



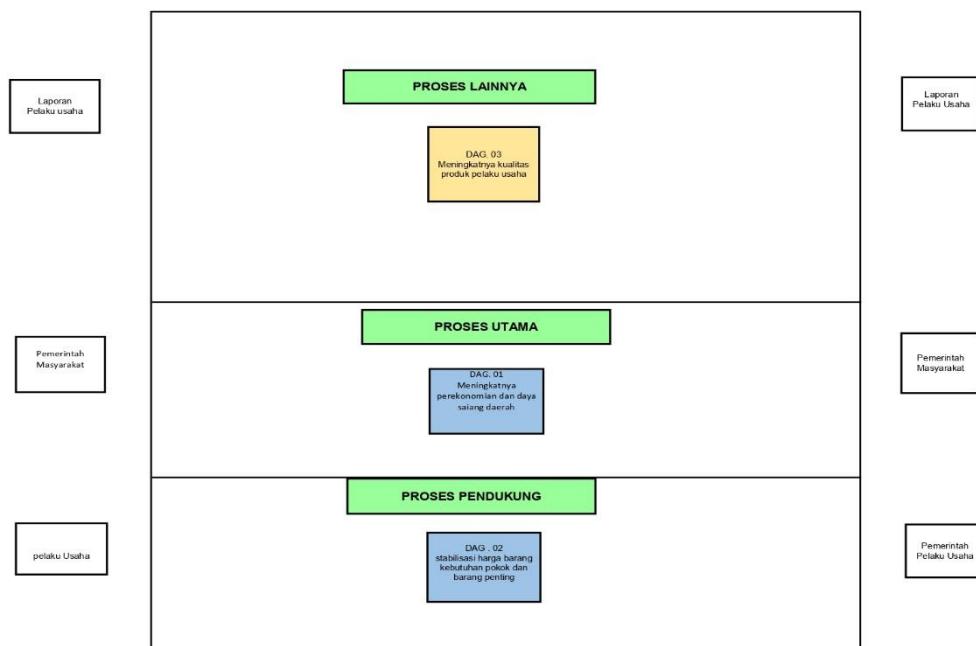
1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Perdagangan sebagaimana skema berikut:

Gambar 3
Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan

PROSES UTAMA / tujuan		PROSES BISNIS/ sasaran		SUB PROSES BISNIS /strategi		Peta Lintas Fungsi/ Arah Kebijakan	
1		1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
DAG	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	DAG 01	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	DAG 01.01	Peningkatan Produktivitas masyarakat	DAG 01.01.01	Meningkatkan Produktivitas Pelaku Usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM
						DAG 01.01.02	Melaksanakan Promosi dagang melalui pameran dagang produk lokal
						DAG 01.01.03	Melaksanakan Pelatihan Pemasaran Produk UMKM
DAG	Mewujudkan pengawasan terhadap Distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan barang penting	DAG 02	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DAG 02.01	Peningkatan daya Beli Masyarakat	DAG 02.01.01	Menjamin distribusi dan harga bahan pokok
						DAG 02.01.02	Melaksanakan operasi pasar murah
						DAG 02.01.03	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		DAG 03	Peningkatan Kualitas Produk Pelaku Usaha	DAG 03.01	Meningkatkan Standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	DAG 03.01.01	Melakukan Pengawasan barang kebutuhan pokok, barang penting dan Produk UMKM

PETA PROSES BISNIS DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1301.1/INSP.S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Internal Dinas Perdagangan, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Membuat Rencana Aksi Kinerja	Menindaklanjuti Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kerja Output : Dokumen Rencana Aksi Kinerja	1 Dokumen	2 Hari Kerja	Sekretariat Dinas Perdagangan	Output telah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1RL6fg0Fx11gtzlt-1X6SxoiijLnkvYCr/view?usp=sharing
2	Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan pada website Dinas Perdagangan Kota Dumai	Mengupload Dokumen Perencanaan di Website Output : Dokumen terpublikasikan sebagai bentuk transparansi kegiatan dan anggaran	1 Dokumen	1 Hari Kerja	Sekretariat Dinas Perdagangan	Output telah tercapai	
3	Membuat Crosscuting Dinas Perdagangan Kota Dumai	Mengkoordinasikan Program Kegiatan antar bidang yang dituangkan dalam Crosscuting Output : Dokumen Crosscuting Dinas Perdagangan	1 Dokumen	1 Hari Kerja	Sekretariat Dinas Perdagangan	Output telah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1_nUmjF2spwn8QVLXMPG375Vw_SFIAtmw/view?usp=sharing

4	Membuat SK IKU Dinas Perdagangan Kota Dumai	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui SK IKU Output : SK IKU Dinas Perdagangan	1 Dokumen	1 Hari Kerja	Sekretariat Dinas Perdagangan	Output telah tercapai	https://drive.google.com/file/d/14n5PWqaKgVU-QJH0EYm1aNvTW29ROXtq/view?usp=sharing
5	Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perdagangan	Menetapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perdagangan Output : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perdagangan	1 Dokumen	1 Hari Kerja	Sekretariat Dinas Perdagangan	Output telah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1F1cF7_jkcOQB5NQC L6sEqlyZ7-gUq3xo/view?usp=sharing

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perdagangan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Perdagangan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perdagangan.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

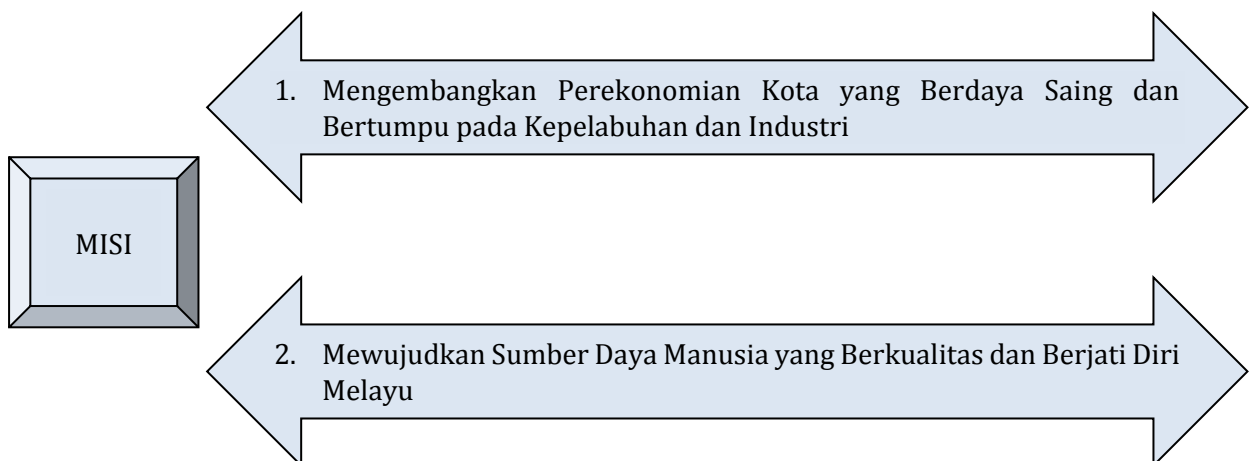
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 4
Misi Dinas Perdagangan Kota Dumai



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Perdagangan Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perdagangan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Perdagangan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk

masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2021 –2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS PERDAGANGAN		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah indikator keberhasilan	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK)	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
					Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran
					Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian
					Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian
					Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal
					Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal
Membangun Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera dengan Indikator Keberhasilan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai dengan Indikator Keberhasilan	Indeks Pengeluaran	Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting
				Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perdagangan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut :

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Tahun 2024

VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU				
MISI I : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHAN DAN INDUSTRI				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatkannya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Meningkatkan pemahaman eksportir / calon eksportir terhadap peluang ekspor	Sosialisasi dan penyuluhan prosedur ekspor dan impor Promosi dan Misi Dagang
			Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang	Penguatan aksi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan secara optimal, berkesinambungan dan koordinatif melalui peningkatan jumlah UTTP yang betanda tera sah berlaku dan pelaksanaan tertib ukur
				Peningkatan efektifitas pengawasan seperti pengawasan UTTP, kegiatan usaha perdagangan dan barang yang diatur tata niaganya
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan serta fasilitas penyediaan sarana usaha perdagangan bagi pedagang	Memperkuat sarana dan prasarana perdagangan dalam upaya kelancaran distribusi dan logistik dengan pembangunan / revitalisasi pasar rakyat berbasis SNI dan memelihara pasar rakyat
				Perluasan networking pelaku usaha perdagangan dan jasa

MISI II : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU				
	Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Meningkatkan efisiensi, kelancaran distribusi serta pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan efisiensi sistem distribusi, logistik dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta peningkatan ketersediaan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memberi bahan masukan untuk mengevaluasi perkembangan harga
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan peningkatan fasilitas pergudangan - Peningkatan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perdagangan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal
2	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perdagangan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran	6370,72 M
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,43%
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	76,58%
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	14,62%
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	20%
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100%
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	7 Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.823.900.348 (*sebelas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 7 (tujuh) Program Kerja antara lain :

Tabel II.5
Program kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.550.160.713	APBD
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.857.100.375	APBD
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.779.000	APBD
5.	Program Pengembangan Ekspor	158.000.000	APBD
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	243.624.500	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	180.946.900	APBD
J U M L A H		Rp. 10.278.611.488	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Perubahan Program kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.394.394.573	APBD
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.458.155.375	APBD
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.779.000	APBD
5.	Program Pengembangan Ekspor	158.000.000	APBD
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	343.624.500	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	180.946.900	APBD
J U M L A H		Rp. 11.823.900.348	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Perdagangan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus :
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- b. Rumus :
$$\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 14,74% realisasi sebesar 14,43%, tercapai 97,90% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 13,97% atau tercapai sebesar 94,84%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 3,06%.

Efisiensi Anggaran	1,15%
Nilai Anggaran	Rp. 55.000.000
Capaian 2024	97,90%
Target	14,74 %
Realisasi	14,43%

b. Indikator Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran

Capaian kinerja untuk indikator Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang

ditetapkan tahun 2024 adalah 6.370,72 Milyar realisasi sebesar 7.775,00 Milyar, tercapai 122,04% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7.281,45 Milyar atau tercapai sebesar 114,87%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 7,17%.

Efisiensi Anggaran	1,29%
Nilai Anggaran	Rp. 158.000.000
Capaian 2024	122,04%
Target	6370,72 Milyar
Realisasi	7.775,00 Milyar

c. Indikator Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian

Capaian kinerja untuk indikator Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20,43% realisasi sebesar 21,63%, tercapai 105,87% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 18,94% atau tercapai sebesar 92,71%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 13,16%.

Efisiensi Anggaran	1,21%
Nilai Anggaran	Rp. 273.990.500
Capaian 2024	105,87%
Target	20,43%
Realisasi	21,63%

d. Indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian

Capaian kinerja untuk indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 76,58% realisasi sebesar 137,39% tercapai 179,41% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 68,28% atau tercapai sebesar 94,74%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 84,67%.

Efisiensi Anggaran	1,86%
Nilai Anggaran	Rp. 69.634.000
Capaian 2024	179,41%
Target	76,58%
Realisasi	137,39%

e. **Indikator** Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal

Capaian kinerja untuk indikator Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 14,62% realisasi sebesar 13,67% tercapai 93,51% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 93,51%.

Efisiensi Anggaran	1,19%
Nilai Anggaran	Rp. 180.946.900
Capaian 2024	93,51%
Target	14,62%
Realisasi	13,67%

f. **Indikator** Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Capaian kinerja untuk indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20,00% realisasi sebesar 19% tercapai 95% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 5%.

Efisiensi Anggaran	1,26%
Nilai Anggaran	Rp. 3.458.155.375
Capaian 2024	95%
Target	20%
Realisasi	19%

g. **Indikator** Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap 100%.

Efisiensi Anggaran	2,56%
Nilai Anggaran	Rp. 34.890.000
Capaian 2024	100%
Target	100%
Realisasi	100%

h. Indikator Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

Capaian kinerja untuk indikator Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 7 Kecamatan realisasi sebesar 7 Kecamatan tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7 Kecamatan atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap 100%.

Efisiensi Anggaran	1,69%
Nilai Anggaran	Rp. 198.889.000
Capaian 2024	100%
Target	7 Kecamatan
Realisasi	7 Kecamatan

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

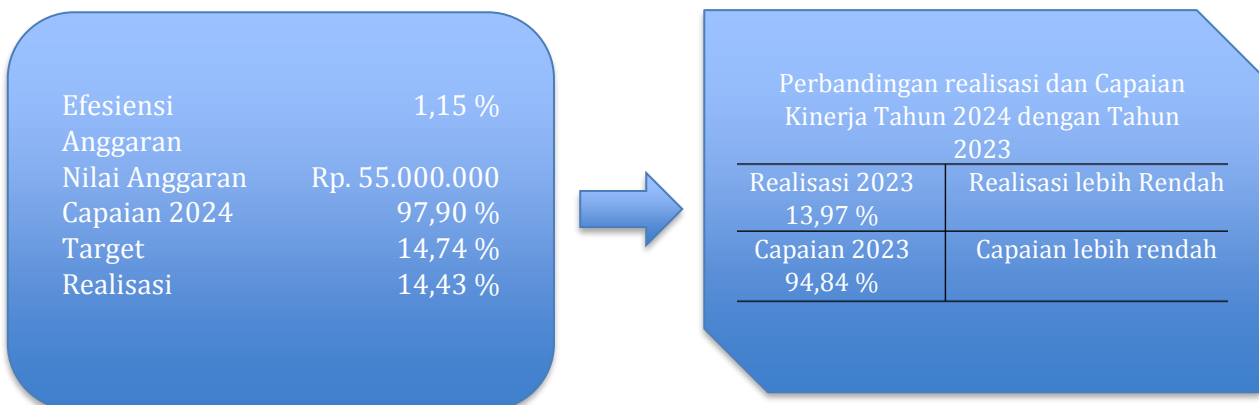
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		14,71 %	14,73 %	14,74 %		14,09 %	13,97 %	14,43 %		95,79 %	94,84 %	97,90 %
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran		6307,49 Milyar	6339,03 Milyar	6370,72 Milyar		6637,96 Milyar	7281,45 Milyar	7775,00 Milyar		105,24 %	114,87 %	122,04 %
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian		18,22 %	20,43 %	20,43 %		18,06 %	18,94 %	21,63 %		99,12 %	92,71 %	105,87 %
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian		66,85 %	72,07 %	76,58 %		28,65 %	68,28 %	137,39 %		42,86 %	94,74 %	179,41 %
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal		10,00 %	10,00 %	14,62 %		0,00 %	0,00 %	13,67 %		0,00 %	0,00 %	93,51 %
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal		100 %	100 %	20,00 %		100 %	100 %	19 %		100 %	100 %	95 %
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting		7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan		7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan		100 %	100 %	100 %

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Perdagangan selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target pada tahun 2023 adalah 14,73 % berasal dari perhitungan PDRBn + 0,1% (PDRBn).
- b. Pada tahun 2023 Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi pada tahun 2023 adalah 13,97 % dengan capaian 94,84 %.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 14,74 % dan realisasinya 14,43% dengan rincian capaian kinerja sebesar 97,90%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Kurangnya kerjasama antar daerah, sehingga komoditi yang diekspor kurang bervariasi

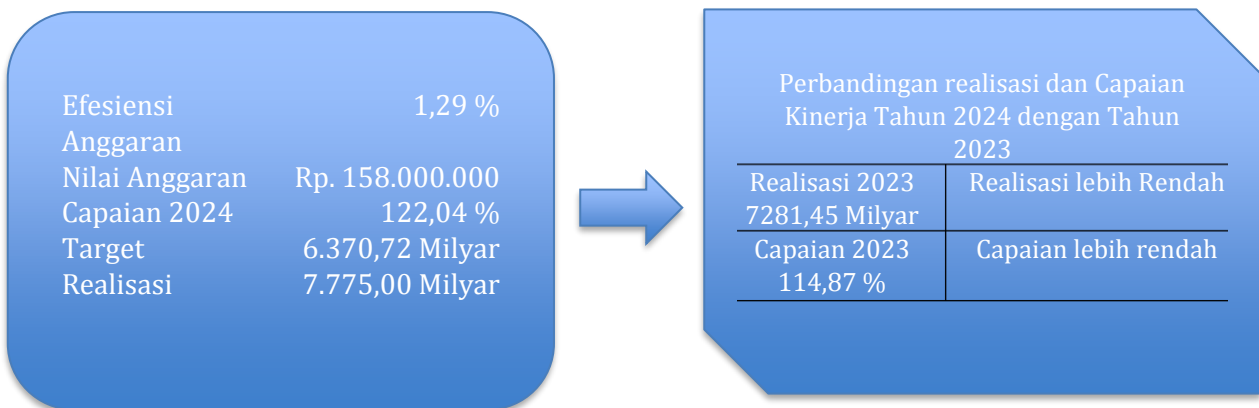


2. a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran dengan target pada tahun 2023 adalah 6339,03 Milyar berasal dari perhitungan (Data BPS) + 0,5% (Data BPS).
- b. Pada tahun 2023 Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran. Realisasi pada tahun 2023 adalah 7281,45 Milyar dengan capaian 114,87%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 6.370,72 Milyar dan realisasinya 7.775,00 Milyar dengan rincian capaian kinerja sebesar 122,04%.
- d. PDRB itu dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, kebijakan pemerintah terkait ekonomi nasional, ekspor impor jadi dapat kami jelaskan bahwa realisasi tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 disebabkan

konsumsi rumah tangga tinggi akibatnya daya beli masyarakat meningkat dan Ekspor Indonesia Tahun 2024 meningkat dimana komoditas CPO mengalami kenaikan sekitar 30% disebabkan juga kenaikan terhadap minyak dunia sehingga tahun 2024 terjadi kenaikan atau melebihi target.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

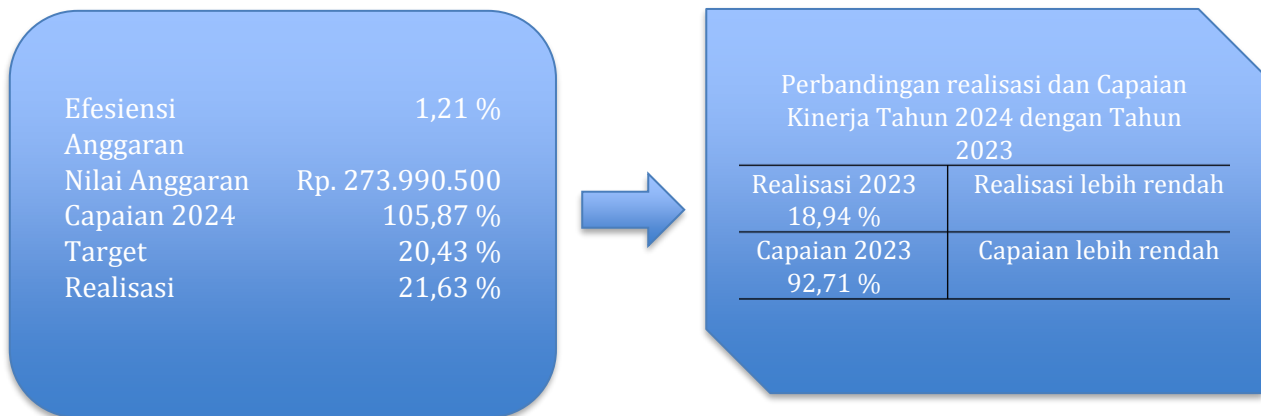
- Kurangnya informasi yang di dapat oleh eksportir terkait bea keluar produk-produk ekspor



- 3 a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgion dengan target pada tahun 2023 adalah 20,43% berasal dari perhitungan target UTTP 1.157 unit dibagi dengan UTTP 5.663 unit dikali dengan 100%.
- b. Pada tahun 2023 Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgion dibuktikan dengan Buku Layanan Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 adalah 18,94% dengan capaian 92,71%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 20,43% dan realisasinya adalah 21,63% dengan rincian capaian kinerja sebesar 105,87%. Pada tahun 2024 target UTTP 1.157 unit, capaian alat UTTP yang diselesaikan atau direalisasikan berjumlah 1.225 unit UTTP.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

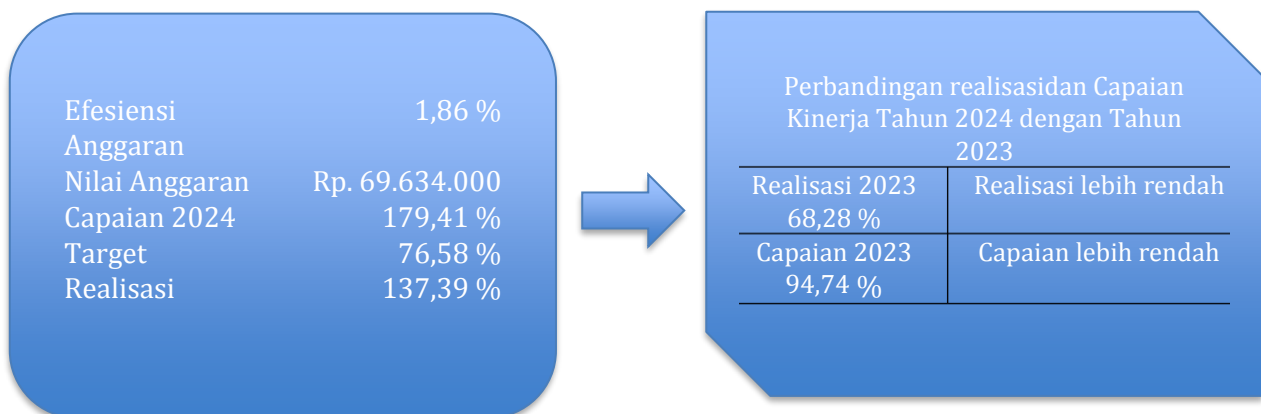
- Masih kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan Tera/Tera Ulang UTTP dan menganggap tidak penting UTTP di Tera/Tera Ulang.



4. a. Indikator Kinerja Yang ke empat adalah Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian dengan target pada tahun 2023 adalah 72,07% berasal dari perhitungan 800 Pelaku Usaha dibagi dengan 1.110 Pelaku Usaha di kali dengan 100%.
- b. Pada tahun 2023 Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian dibuktikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 adalah 68,28% dengan capaian 94,74%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 76,58% dan realisasinya adalah 137,39% dengan rincian capaian kinerja 179,41% yaitu target 850 pelaku usaha dibagi dengan realisasi 1.525 pelaku usaha dikali 100%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

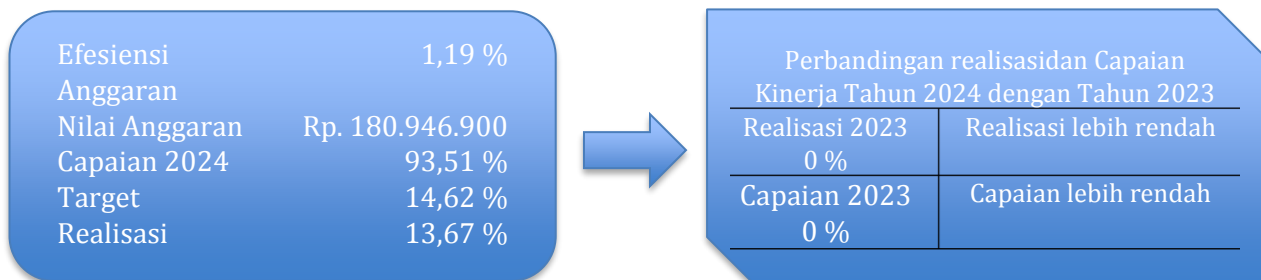
- Pelaku usaha beralasan bahwa akan di pungut biaya jika dilakukan pengawasan dan penyuluhan.



5. a. Indikator Kinerja Yang ke lima adalah Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal dengan target pada tahun 2023 adalah 10,00 % berasal dari perhitungan Jumlah Pedagang yang dipromosikan / 100 Pedagang yang di data.
- b. Pada tahun 2023 Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal tidak ada tersedianya anggaran sehingga Realisasi pada tahun 2023 adalah 0 % dengan capaian 0 %.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 14,62 % dan realisasinya adalah 13,67 % dengan rincian capaian kinerja 93,51 %.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Kurangnya kualitas produk / jasa

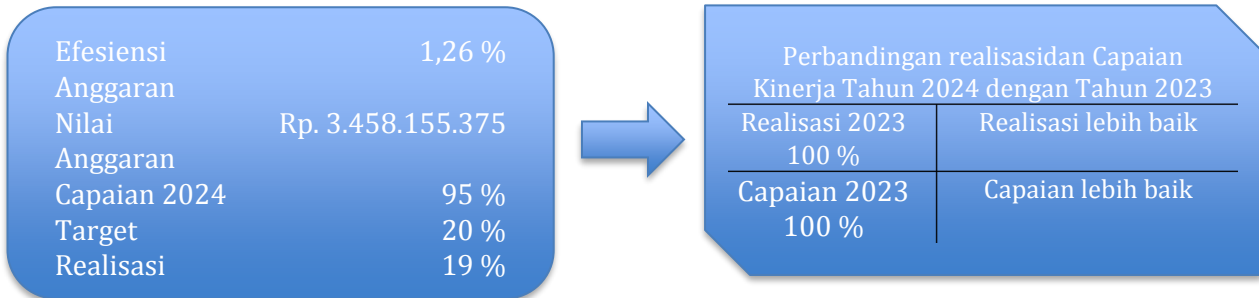


6. a. Indikator Kinerja Yang ke enam adalah Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal dengan target pada tahun 2023 adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah Kelompok Pedagang yang di Bina / Jumlah Pasar Pemerintah.
- b. Pada tahun 2023 Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal melaksanakan pendataan pedagang jalan Dock, pedagang di pinggir jalan Ombak yang akan direlokasikan ke Pasar Kelakap Tujuh dan Pasar Lepin. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100 % dengan capaian 100 %.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja turun menjadi 20% dan realisasinya adalah 19% dengan rincian capaian kinerja 95% yaitu dengan melakukan pendataan pedagang di pasar yang ada di Kota Dumai.
- d. dapat kami jelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan dan tidak bisa menjadi dasar untuk penetapan target tahun berikutnya hal ini disebabkan semua target capaian kinerja sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai 2021-2026 dan diturunkan kedalam Rencana Strategi (Renstra) DPMPTSP

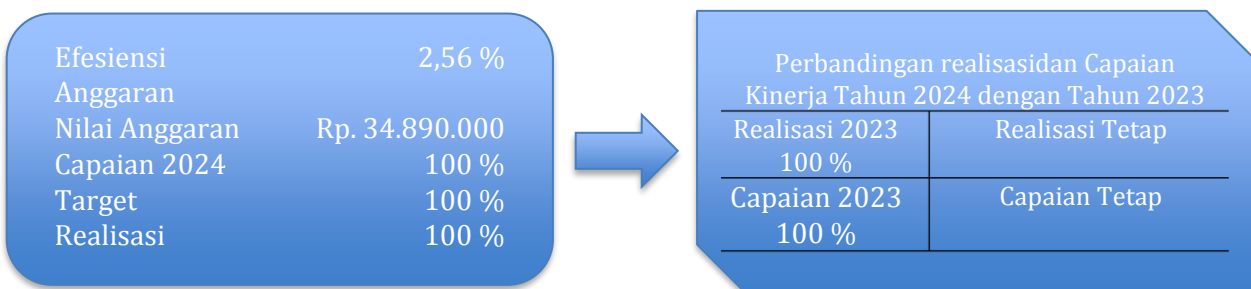
2021-2026 dan belum bisa dilaksanakan revisi terhadap Renstra tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

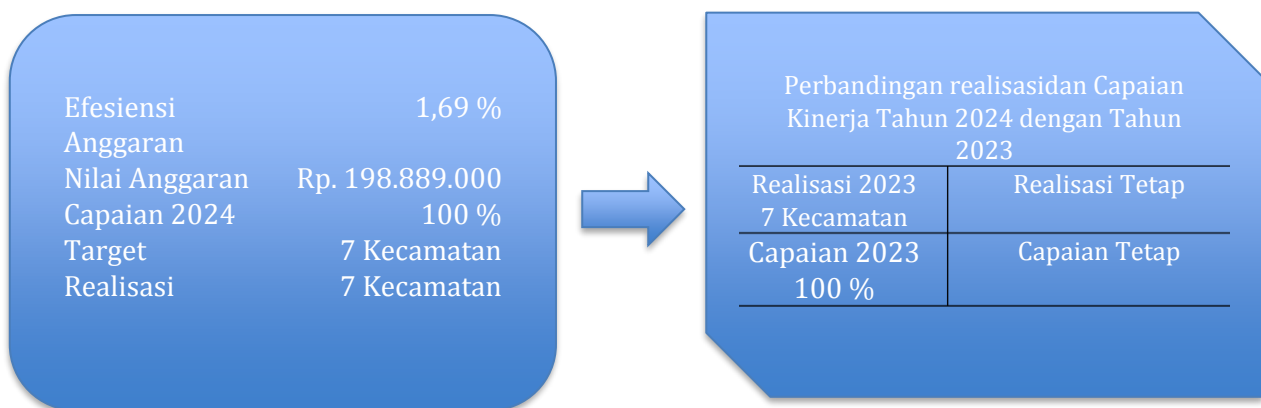
- Keterbatasan Marketing



7. a. Indikator Kinerja Yang ke tujuh adalah Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting dengan target pada tahun 2023 adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah Pengawasan Kecamatan yang di pantau / Jumlah Kecamatan yang di Kota Dumai.
- b. Pada tahun 2023 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100 % dengan capaian 100 %.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian capaian kinerja 100% yaitu telah dilaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pengawasan LPG 3 Kg di beberapa pangkalan LPG dan distributor bahan pokok dan barang penting.



8. a. Indikator Kinerja Yang ke delapan adalah Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting dengan target pada tahun 2023 adalah 7 Kecamatan berasal dari perhitungan Jumlah Kecamatan.
- b. Pada tahun 2023 Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting. Realisasi pada tahun 2023 adalah 7 Kecamatan dengan capaian 100 %.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 7 Kecamatan dan realisasinya adalah 7 Kecamatan dengan rincian capaian kinerja 100% yaitu dengan melakukan Operasi Pasar di 7 Kecamatan.

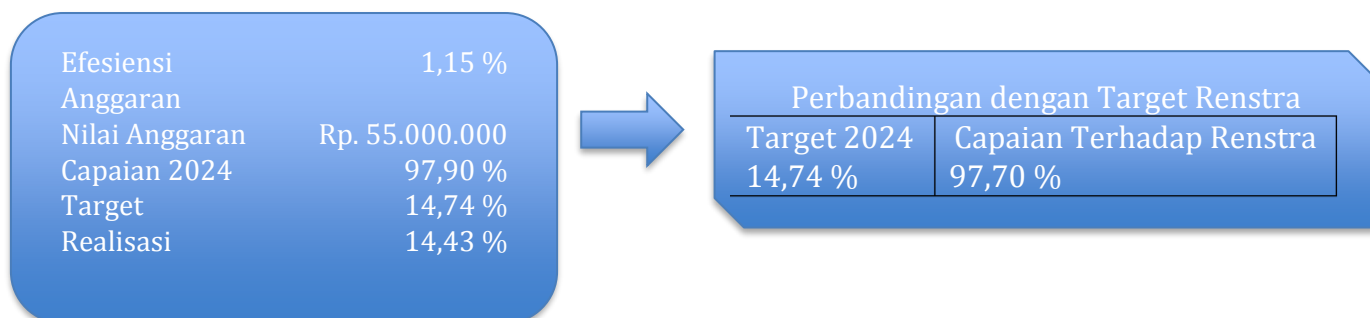


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

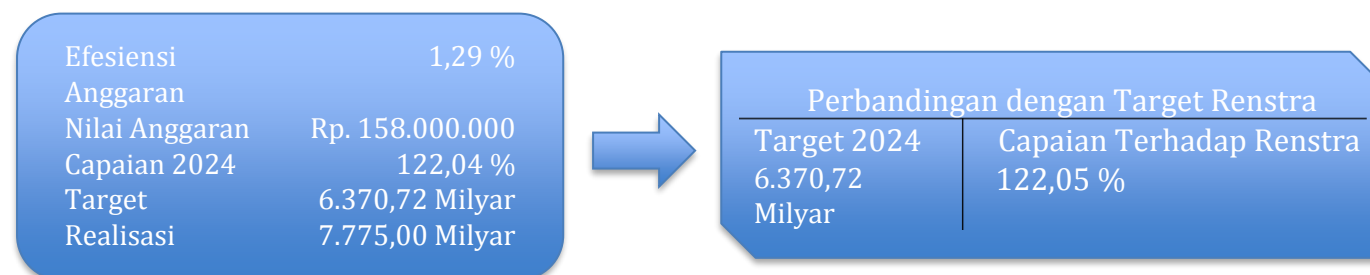
a. Indikator Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 0,34% dari target Renstra sebesar 14,77% dan terealisasi 14,43% pada tahun 2024.



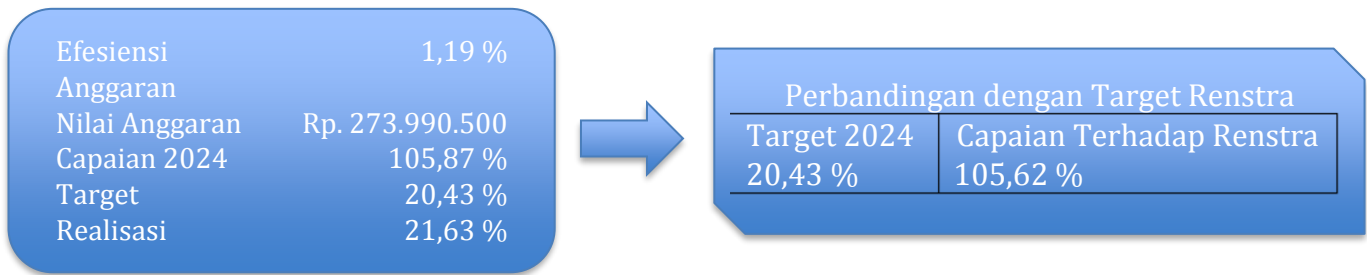
b. Indikator Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 1.340,41 Milyar dari target Renstra sebesar 6.434,59 Milyar dan terealisasi 7.775,00 Milyar pada tahun 2024.



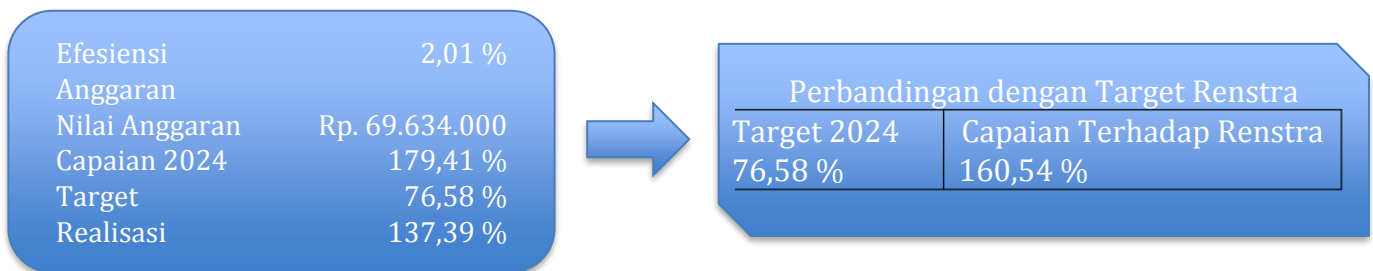
c. Indikator Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 1,15% dari target Renstra sebesar 20,48% dan terealisasi 21,63% pada tahun 2024.



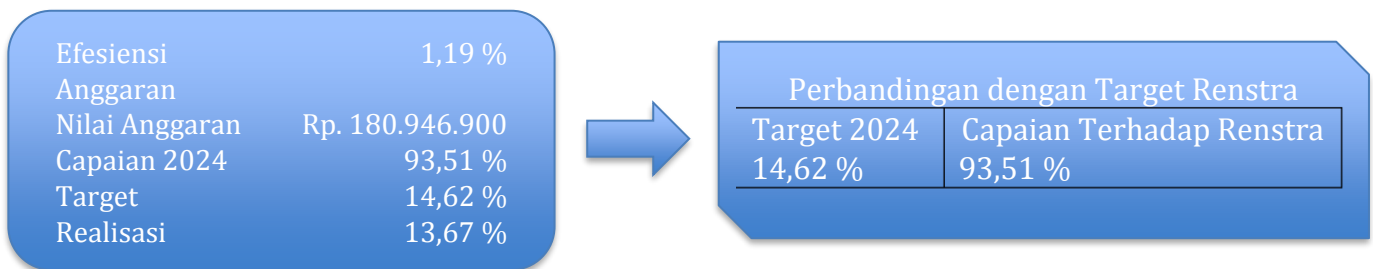
d. Indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 51,81% dari target Renstra sebesar 85,58% dan terealisasi 137,39% pada tahun 2024.



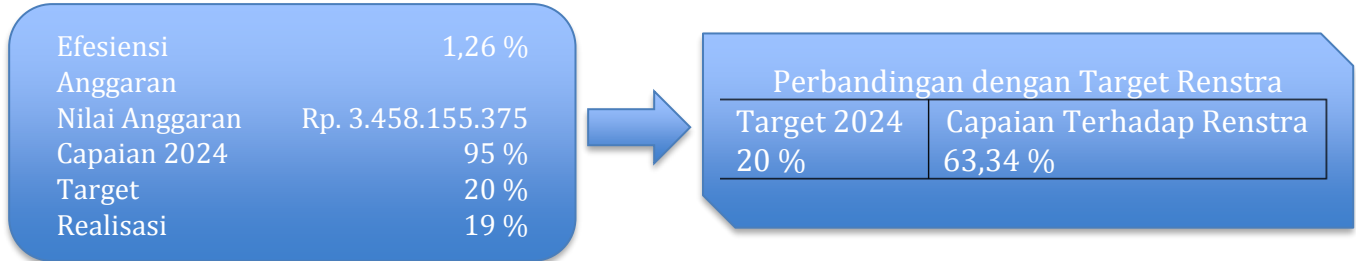
e. Indikator Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 0,95% dari target Renstra sebesar 14,62% dan terealisasi 13,67% pada tahun 2024.



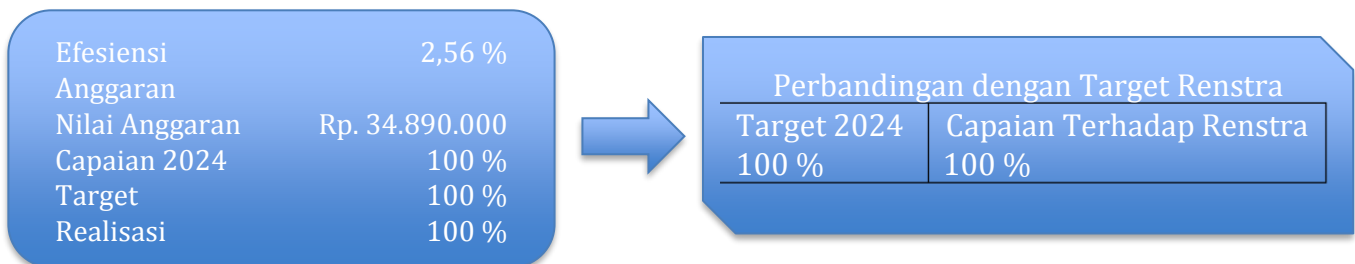
f. Indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 11% dari target Renstra sebesar 30% dan terealisasi 19% pada tahun 2024.



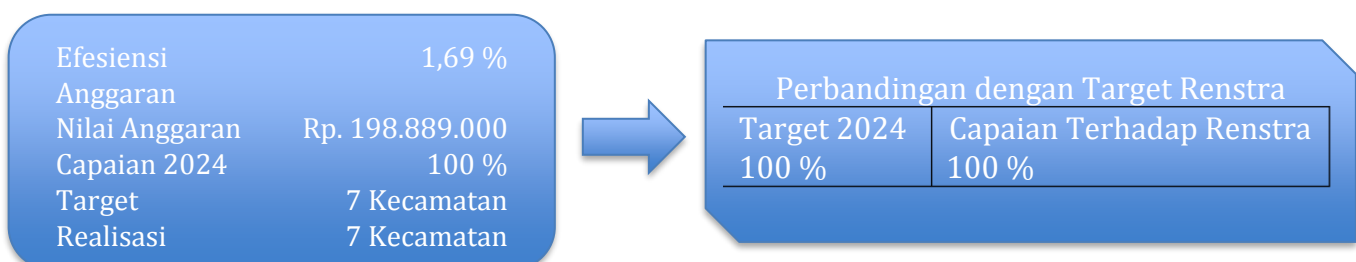
g. Indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting tahun 2024 cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.



h. Indikator Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 7 Kecamatan dan terealisasi 7 Kecamatan pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,43 %	Tidak Ada	Isi dengan Ada/ Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran	7.775,00 Milyar	Tidak Ada	
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	21,63 %	Tidak Ada	
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	137,39 %	Tidak Ada	
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	13,67 %	Tidak Ada	
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	19 %	Tidak Ada	
2	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	Tidak Ada	
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	7 Kecamatan	Tidak Ada	

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 14,74% realisasi sebesar 14,43%, tercapai 97,90% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 13,97% atau tercapai sebesar 94,84%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 3,06%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Minat pelaku UMKM ekspor yang tinggi untuk melakukan kegiatan ekspor-impor
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebagai berikut:
 - Komoditi yang diekspor relatif masih sama dari tahun ke tahun, dan masih bersifat bahan mentah
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebagai berikut:
 - Melakukan promosi dan misi dagang
2. Indikator Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 6.370,72 Milyar realisasi sebesar 7.775,00 Milyar, tercapai 122,04% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7.281,45 Milyar atau tercapai sebesar 114,87%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 7,17%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran kurang/

sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya pelabuhan bongkar muat untuk kegiatan

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan ekspor masih berskala kecil

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- Memberikan fasilitasi kepada eksportif

3. Indikator Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20,43% realisasi sebesar 21,63%, tercapai 105,87% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 18,94% atau tercapai sebesar 92,71%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 13,16%.

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan Indikator ini yakni :

$$\frac{\text{Jumlah Unit Terlayani (1.225 unit)}}{\text{Potensi UTTP (1.157 unit)}} \times 100 \%$$

Jumlah unit UTTP yang terlayani pada Tahun 2024 sebanyak 1.225 unit dengan target 1.157 unit sehingga terealisasi sebesar 105,87%

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- SDM kemetrolgian yang secara maksimal melakukan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran dari pemilik UTTP dalam melakukan Tera/Tera Ulang

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian adalah sebagai berikut:

- Melakukan sidang tera ulang di lokasi pemilik UTTP secara langsung

4. Indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 76,58% realisasi sebesar 137,39%, tercapai 179,41% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 68,28% atau tercapai sebesar 94,74%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 84,67%.

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan Indikator ini yakni :

$$\frac{\text{Jumlah Pemilik UTTP yang diawasi atau dilakukan Penyuluhan (1.525 Orang)}}{\text{Potensi Pemilik UTTP (850 Orang)}} \times 100 \%$$

Jumlah pemilik UTTP yang diawasi pada tahun 2024 sebanyak 1.525 orang dengan target 850 orang sehingga terealisasi 179,41%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- SDM kemetrolgian yang secara maksimal melakukan Pengawasan/Pelayanan UTTP

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian adalah sebagai berikut:

- Anggaran Pengawasan/Penyuluhan yang masih relatif rendah

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan Anggaran yang ada demi terciptanya Pengawasan/Penyuluhan yang efektif dan efisien

5. Indikator Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 14,62% realisasi sebesar 13,67% tercapai 93,51% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 93,51%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Kesadaran akan pentingnya pengembangan usaha
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya kualitas produk / jasa
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pelatihan / pembinaan
6. Indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20,00% realisasi sebesar 19%, tercapai 95% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 5%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Pengembangan produk dan jasa
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal adalah sebagai berikut:
 - Keterbatasan marketing
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal adalah sebagai berikut:
 - Melakukan kegiatan sosialisasi / pelatihan pengembangan produk / jasa

7. Indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 1005 atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan rencana terkait ketersediaan kebutuhan barang pokok dan harga ke distributor

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya ketersediaan komoditi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca dan angkutan

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting adalah sebagai berikut:

- Memberikan sosialisasi dan edukasi ke tingkat agen dan distributor serta melakukan pemantauan secara berkala

8. Indikator Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 7 Kecamatan realisasi sebesar 7 Kecamatan tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7 Kecamatan atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Pemantauan dan pengawasan bahan pokok penting dan LPG 3 Kg dilakukan secara maksimal dan mencatat dan melaporkan harga harian bapokting setiap hari ke Kementrian Perdagangan SP2KP
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting adalah sebagai berikut:
- Masih ada agen dan beberapa pangkalan LPG 3 Kg tidak memberikan laporan dan menjual diatas HET 3 Kg, penyaluran distribusi yang terlambat akibat cuaca
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting adalah sebagai berikut:
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap agen LPG 3 Kg dan pemantauan dan pengawasan bapokting secara rutin dan setiap hari besar keagamaan.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan taupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap	Persentase Realisasi Dokumen SKA	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	14,74%	14,43%	97,90%	55.000.000	46.840.000	85,16 %
2	Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran	Perekonomian	Persentase Volume Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	6.370,72 Milyar	7.775,00 Milyar	122,04%	158.000.000	150.499.400	95,25 %
3	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian		Persentase Alat UTTP yang di tera / tera ulang dan dilakukan pengawasan / penyuluhan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	20,43%	21,63%	105,87%	273.990.500	239.682.083	87,48 %
4	Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian				76,58%	137,39%	179,41%	69.634.000	67.429.301	96,83 %
5	Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal		Persentase Pelaku Usaha yang ikut Promosi Produk dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14,62%	13,67%	93,51%	180.946.900	142.369.840	78,68 %

6	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal		Persentase Pasar Tradisional Pemerintah yang tertib, bersih dan aman	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20%	19%	95%	3.458.155.375	2.614.064.014	75,59 %
7	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok	Persentase Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting di 7 Kecamatan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	34.890.000	13.623.000	39,05 %
8	Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Masyarakat dan Kestabilan Harga			7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	198.889.000	117.704.550	59,19 %

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	97,90 %	85,16 %
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran	122,04 %	95,25 %
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	105,87 %	87,48 %
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	179,41 %	96,83 %
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	93,51 %	78,68 %
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	95 %	75,59 %
	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	39,05 %
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	59,19 %

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada Indikator Kinerja Utama **Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB** persentase tingkat efisiensinya adalah 1,15 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (97,90%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (85,16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- b. Pada Indikator Kinerja Utama **Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran** persentase tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (122,04%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (95,25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- c. Pada Indikator Kinerja Utama **Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrollogian** yaitu persentase tingkat efisiensinya adalah 1,21 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (105,87%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (87,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- d. Pada Indikator Kinerja Utama **Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrollogian** yaitu persentase tingkat efisiensinya adalah 1,86 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (179,41%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (96,83%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- e. Pada Indikator Kinerja Utama **Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal** yaitu persentase tingkat efisiensinya adalah 1,19 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (93,51%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (78,68%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- f. Pada Indikator Kinerja Utama **Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal** yaitu persentase tingkat efisiensinya adalah 1,26 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (75,59%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- g. Pada Indikator Kinerja Utama **Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting** yaitu persentase tingkat efisiensinya adalah 2,56 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (39,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- h. Pada Indikator Kinerja Utama **Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting** yaitu persentase tingkat efisiensinya adalah 1,69 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (59,19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.7
Prestasi dan Penghargaan Dinas Perdagangan Tahun 2024**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Tidak Ada			

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.8
Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.394.394.573	6.360.772.314	86,03
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.253.575	99.169.950	83,16
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.867.775	55.461.600	97,53
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	5.774.600	57,75
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	5.577.950	55,78
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.430.100	7.706.800	73,89
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.133.900	6.804.200	67,14
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.886.200	8.754.400	80,42
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.935.600	9.090.400	83,13
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.619.360.048	4.313.786.753	93,39
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.606.906.148	4.302.285.633	93,39
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.453.900	7.230.900	97,01
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.270.220	85,40
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	4.017.200	40,18
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	694.000	13,88
	2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.823.200	91,16
	3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	1.500.000	50,00
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	79.999.990	100
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	9.999.990	100
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	70.000.000	100
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.435.576	472.046.991	76,83
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.200	14.535.000	72,71
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.308.900	69.375.500	83,28
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.681.500	51.498.000	51,15
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	28.050.000	70,13
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	29.967.000	74,92
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	5.350.000	76,43
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.453.976	273.271.491	84,49

	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	147.570.000	98,38
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	147.570.000	98,38
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.395.959.174	1.040.643.327	74,55
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	740.795.174	457.233.655	61,72
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.964.000	582.209.672	89,03
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.386.200	203.538.103	50,21
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.500.000	20.000.000	75,47
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	159.458.103	88,59
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.930.000	99,65
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.886.200	4.150.000	2,32
	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.000.000	46.840.000	85,17
	1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	20.000.000	12.280.000	61,40
	1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20.000.000	12.280.000	61,40
	2	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	35.000.000	34.560.000	98,75
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	35.000.000	34.560.000	98,74
	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.458.155.375	2.614.064.013,92	75,60
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.372.738.675	2.545.231.813,92	75,47
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.372.738.675	2.545.231.813,92	75,46
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	85.416.700	68.832.200	80,59
	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.700	37.830.300	75,66
	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.416.000	31.001.900	87,54
	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.779.000	131.327.550	56,18
	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	34.890.000	13.623.000	39,05
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.890.000	13.623.000	39,05
	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	198.889.000	117.704.550	59,19
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	99.984.000	79.313.550	79,33

		2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	98.905.000	38.391.000	38,82
5	Program Pengembangan Ekspor			158.000.000	150.499.400	95,26
	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		158.000.000	150.499.400	95,26
		1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	158.000.000	150.499.400	95,25
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			343.624.500	307.111.384	89,38
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		343.624.500	307.111.384	89,38
		1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	273.990.500	239.682.083	87,48
		2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	69.634.000	67.429.301	96,83
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			180.946.900	142.369.840	78,68
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		180.946.900	142.369.840	78,68
		1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	97.117.000	91.401.200	94,11
		2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	83.829.900	50.968.640	60,80
				11.823.900.348	9.752.984.501,92	82,49

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan Kota Dumai. LKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat intropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan kesesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, Dokumen RKPD Tahun 2024, Capaian IKU Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai yang terdiri atas 8 Kinerja Utama dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikator 1 Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan capaian 97,90% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan $PDRB_{n+1} + 0,1\%$ ($PDRB_n$). Dari target 14,74% dapat terealisasi 14,43% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.
2. Indikator 2 Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran PDRB dengan capaian 122,04% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan (Data BPS) + 0,5% (Data BPS). Dari target 6.370,72 Milyar dapat terealisasi 7.775,00 Milyar dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.
3. Indikator 3 Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian dengan capaian 105,87% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan jumlah alat UTTP yang diselesaikan atau direalisasikan berjumlah 1.225 unit UTTP di bagi target UTTP 1.157 unit dikali 100%. Dari target 20,43% dapat terealisasi 21,63% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.
4. Indikator 4 Capaian Indikator Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolagian dengan capaian 179,41% pada Tahun 2024 berasal dari

perhitungan jumlah 1.525 Pelaku Usaha dibagi dengan 850 Pelaku Usaha di kali dengan 100%. Dari target 76,58 % dapat terealisasi 137,39 % dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

5. Indikator 5 Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal dengan capaian 93,51% pada tahun 2024 berasal dari perhitungan Jumlah Pedagang yang dipromosikan / 100 Pedagang yang di data. Dari target 14,62% dapat terealisasi 13,67% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.
6. Indikator 6 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal dengan capaian 95% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan Jumlah kelompok pedagang yang di bina dibagi dengan Jumlah Pasar Pemerintah. Dari target 20% dapat terealisasi 19% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.
7. Indikator 7 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting dengan capaian 100,00% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan Jumlah pengawasan kecamatan yang dipantau dibagi dengan Jumlah kecamatan yang di Kota Dumai. Dari target 100% dapat terealisasi 100% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.
8. Indikator 8 Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting dengan capaian 100,00% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Dumai. Dari target 7 Kecamatan dapat terealisasi 7 Kecamatan dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

1. Dinas Perdagangan Kota Dumai di Bidang Metrologi akan Melakukan peningkatan pelayanan UTTP sejalan dengan kegiatan penyuluhan ke pemilik UTTP dan akan Memaksimalkan kegiatan penyuluhan dan pengawasan ke daerah jangkauan yang lebih luas sehingga kegiatan yang dilakukan akan terlaksana sampai ke daerah terjauh.
2. Dinas Perdagangan Kota Dumai di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :
 - a. Mengajukan pembangunan sarana prasarana untuk pasar-pasar tradisional dan perlunya tambahan ASN di bidang tersebut.
 - b. Memaksimalkan kegiatan operasi pasar, serta pengawasan LPG 3 Kg dan Bapokting ke 7 Kecamatan Kota Dumai.

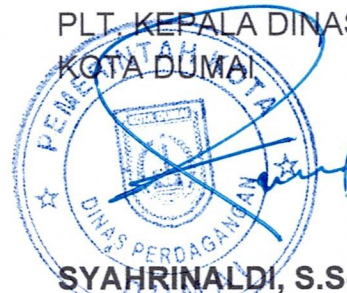
- c. Mengajukan anggaran kegiatan yang tidak tersedia anggarannya pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021- 2026.
3. Dinas Perdagangan Kota Dumai di Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri akan melakukan sosialisasi terkait ekspor ke pelaku UMKM ekspor dan akan melakukan promosi dan misi dagang ke daerah-daerah di luar Kota Dumai atau bahkan ke Provinsi Lain.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, Desember 2024

PLT. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA DUMAI.



SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681025 199002 1 001

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI.
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI : MISI I : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
SASARAN : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$PDRB_n + 0,1\%$ (PDRB n)		14,7 %	14,71 %	14,73 %	14,74 %	14,76 %	14,77 %													2 2	23	21
										Meningkatkannya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PRDB ADHK menurut Pengeluaran	$(Data\ BPS) + 0,5\%$ (Data BPS)	6276,11	6307,49	6339,03	6370,72	6402,58	6434,59	Meningkatkan pemahaman eksportir/calon eksportir terhadap peluang ekspor	Sosialisasi dan penyuluhan prosedur ekspor dan import	-Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan -Program Pengembangan Ekspor			
										Capaian Pelayanan tera/tera ulang kemetrolagian	Jumlah unit terlayani/ Potensi UTTP x 100%		12,89 %	18,22%	20,43%	20,43%	20,43%	20,48%	Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penguatan aksi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan secara optimal, berkesinambungan dan koordinatif melalui Peningkatan jumlah UTTP yang bertanda tera sah berlaku dan pelaksanaan tertib ukur	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
										Capaian pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian	Jumlah Pemilik UTTP yang diawasi atau dilakukan penyuluhan / Potensi Pemilik UTTP x 100%		6,76 %	66,85%	72,07%	76,58%	81,08%	85,59%	Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan efektifitas pengawasan seperti pengawasan UTTP, kegiatan usaha perdagangan, dan barang yang diatur tata niaganya.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
										Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	Jumlah Pedagang yang di promosikan / 100 Pedagang yang Di data		10,00 %	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan serta fasilitas penyediaan sarana usaha perdagangan bagi pedagang	Perluasan networking pelaku usaha perdagangan dan jasa	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI.
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI : MISI II : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU
SASARAN : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Jumlah Pengawasan Kecamatan yang di pantau / Jumlah Kecamatan yang di Kota Dumai	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %														
										Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Meningkatkan efisiensi, kelancaran distribusi serta pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan efisiensi sistem distribusi, logistik dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta peningkatan ketersediaan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memberi bahan masukan untuk mengevaluasi perkembangan harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	

Dumai, Januari 2024
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 KOTA DUMAI,



FRIDARSON, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641005 199303 1 006

Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	14,62 %	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	14 %	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	10 UMKM	180.946.900,00	
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	97.117.000,00	
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	83.829.900,00	
Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	20 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	73,31 %	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	3 Pasar	3.372.738.675,00	
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3 Unit	3.372.738.675,00	
					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat	4 Dokumen	85.416.700,00	
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	3 Dokumen	50.000.700,00	
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	35.416.000,00	
Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan	100 %	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Daerah	5 Laporan	34.890.000,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	34.890.000,00
	Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	7 Kecamatan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat	12 Laporan	198.889.000,00			
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	7 Laporan	99.984.000,00

					Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	5 Laporan	98.905.000,00
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------

Dumai, Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai



SYAHRINALDI, S. Sos./M. Si
Pembina Utama Muda/ IV. C
NIP. 19681025 199002 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRIDARSON, SH, M. Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
2	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74
3	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	6370,72
		Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	20,00
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100,00
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,43
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	76,58
4	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu		
5	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 55.000.000	
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.331.409.656	
3.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 158.000.000	
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 243.624.500	
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 180.946.900	
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 233.779.000	

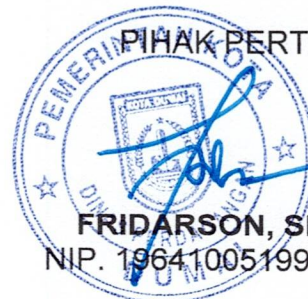
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.669.778.493	Pendukung
----	-------------------------------------------------------------	-------------------	-----------

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FAZRUL BASRI, S. Si**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FRIDARSON, SH, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan			
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan			
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	%	100

Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.669.778.493
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 119.253.575
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 56.867.775
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10.000.000
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.000.000
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 10.430.100

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp.	10.133.900
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	10.886.200
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10.935.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.491.748.818
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.479.294.918
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	7.453.900
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	5.000.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.000.000
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	5.000.000
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	2.000.000
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	3.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	42.000.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	10.000.000

1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	32.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	547.128.600
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	19.991.200
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	83.308.900
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	56.873.500
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	40.000.000
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	40.000.000
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	7.000.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	299.955.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	150.000.000
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	150.000.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1.065.654.000
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1.200.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	423.990.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	640.464.000

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	243.993.500
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	19.000.000
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	180.000.000
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	20.000.000
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	24.993.500
	Jumlah	Rp.	6.669.778.493

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA



FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **OKTO PERMADI, Sos.M.IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FRIDARSON, SH, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI Selaku atasan langsung**

Pihak Pertama

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72
	Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	%	20,00
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100,00
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa mandiri			
Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100
Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7

Sasaran 1:	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	20.000.000
		2.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	Rp.	20.000.000
		2.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	20.000.000
		3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.331.409.656
		3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.245.992.956
		3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.245.992.956
		3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	85.416.700
		3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	50.000.700
		3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	35.416.000
		6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	180.946.900

		6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	180.946.900
		6.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Rp.	97.117.000
		6.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	83.829.900
Sasaran 2:	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga.	7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	233.779.000
		7.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	34.890.000
		7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	34.890.000
		7.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.	198.889.000
		7.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Rp.	99.984.000

7.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	98.905.000
	Jumlah	Rp.	1,766,135,556.00

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WAN SUDIRMAN, ST, M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FRIDARSON, SH, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72

Sasaran 1: Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	35.000.000
	1.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Rp.	35.000.000
	1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp.	35.000.000
	2.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	158.000.000
	2.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi	Rp.	158.000.000

**Produk Ekspor
Unggulan yang
Terdapat pada 1 (satu)
Daerah Kabupaten /
Kota**

2.1.1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp.	158.000.000
	Jumlah	Rp.	193.000.000

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADI PUTRA, ST, M. Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FRIDARSON, SH, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	%	20,43
	Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	%	76,58

Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	243.624.500
		1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp.	243.624.500
		1.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	173.990.500
		1.1.2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	69.634.000
			Jumlah	Rp.	243.624.500

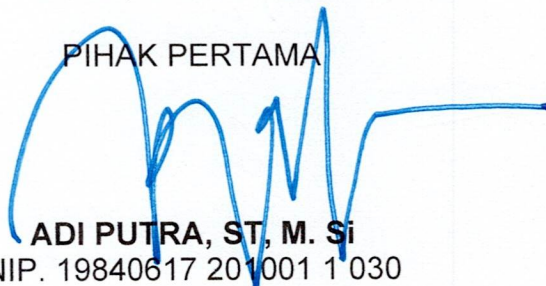
Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA



ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WINDA KESUMA IRSANTI, S. Sos, M. Si**

Jabatan : KASUBBAG. TATA USAHA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAZRUL BASRI, S. Si**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

PIHAK PERTAMA


WINDA KESUMA IRSANTI, S. Sos, M. Si
NIP. 19780119 200604 2 014

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan			
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan			
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	%	100

Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.058.776.100
		1.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
		1.1.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.000.000
		1.1.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 2.000.000
		1.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 3.000.000
		1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 42.000.000

1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	10.000.000
1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	32.000.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	547.128.600
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	19.991.200
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	83.308.900
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	56.873.500
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	40.000.000
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	40.000.000
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	7.000.000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	299.955.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	150.000.000
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	150.000.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1.065.654.000
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1.200.000

1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	423.990.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	640.464.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	243.993.500
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	19.000.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	180.000.000
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	20.000.000
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	24.993.500
	Jumlah	Rp.	2.058.776.100

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FAZRUL BASRI, S. Si
 NIP. 19760604 200112 1 002

PIHAK PERTAMA


WINDA KESUMA IRSANTI, S. Sos, M. Si
 NIP. 19780119 200604 2 014



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MAIYETNITA**

Jabatan : **PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **OKTO PERMADI, Sos.M.IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***


Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006

PIHAK PERTAMA


MAIYETNITA
NIP. 19700516 199003 2 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72
	Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	%	20,00
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100,00
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu			
Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100
Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7

Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	0
	2.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	0
	2.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	0
	3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	0
	3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	0

		6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	0
		6.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Rp.	0
		6.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	0
Sasaran 2:	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga.	7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	0
		7.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	0
		7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	0
		7.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.	0
		7.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Rp.	0

7.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	0
	Jumlah	Rp.	0

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006

PIHAK PERTAMA



MAIYETNITA
NIP. 19700516 199003 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TUTI HASRIANTI, S.IP**

Jabatan : ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **OKTO PERMADI, Sos.M.IP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006

PIHAK PERTAMA

TUTI HASRIANTI, S.IP
NIP. 197702272001122 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72
	Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	%	20,00
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100,00
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu			
Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100
Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7

Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	0
	2.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	0
	2.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	0
	3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	0
	3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	0

		6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	0
		6.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Rp.	0
		6.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	0
Sasaran 2:	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga.	7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	0
		7.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	0
		7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	0
		7.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.	0
		7.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Rp.	0

7.2.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006

PIHAK PERTAMA



TUTI HASRIANTI, S.IP
NIP. 197702272001122 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MARWANTI, S.Sos**

Jabatan : JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WAN SUDIRMAN, ST, M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA

MARWANTI, S.Sos
NIP. 19750301200212 2 002

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72

Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	35.000.000
	1.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Rp.	35.000.000
	1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp.	35.000.000
	Jumlah		Rp.	35.000.000

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA



MARWANTI, S.Sos
NIP. 19750301200212 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ASMAYANTI, S.Ag, M.IP**

Jabatan : JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **WAN SUDIRMAN, ST, M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA

ASMAYANTI, S.Ag, M.IP
NIP. 19750318 200604 2 009

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72

Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	1.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	158.000.000
	1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	158.000.000
	1.1.1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp.	158.000.000
		Jumlah	Rp.	158.000.000

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA

ASMAYANTI, S.Ag, M.IP
NIP. 19750318 200604 2 009



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRANS SETIAWAN, S.Sos**

Jabatan : ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **OKTO PERMADI, Sos.M.IP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

OKTO PERMADI, S.Sos.M.IP
NIP. 197610052002121 006

PIHAK PERTAMA

FRANS SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19810331 200604 1 013

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Milyar Rp.	6370,72
	Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	%	20,00
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100,00
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu			
Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100
Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7

Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	0
	2.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	0
	2.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	0
	3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	0
	3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0
	6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	0

		6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	0
		6.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Rp.	0
		6.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	0
Sasaran 2:	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga.	7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	0
		7.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	0
		7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	0
		7.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.	0
		7.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Rp.	0

7.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	0
	Jumlah	Rp.	0

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



OKTO PERMADI, S.Ses.M.IP
NIP. 197610052002121 006

PIHAK PERTAMA



FRANS SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19810331 200604 1 013



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NURSAL FITRI, ST**

Jabatan : PENERA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **ADI PUTRA, ST.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

ADI PUTRA, ST, M.Si

NIP. 19840610 201001 1 030

PIHAK PERTAMA

NURSAL FITRI, ST

NIP. 19780903 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrologian	%	20,43
	Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrologian	%	76,58

Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	0
		1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp.	0
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	0
			Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	0

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

NURSAL FITRI, ST
NIP. 19780903 200903 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TRI MARTINI, S.I. Pust**

Jabatan : KASUBBAG. PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAZRUL BASRI, S. Si**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002


TRI MARTINI, S.I. Pust
NIP. 19800130 200604 2 006

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan			
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan			
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	%	100

Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.611.002.393
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 119.253.575
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 56.867.775
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10.000.000
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.000.000
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 10.430.100

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp.	10.133.900
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	10.886.200
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10.935.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.491.748.818
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.479.294.918
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	7.453.900
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	5.000.000
	Jumlah	Rp.	4.611.002.393

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FAZRUL BASRI, S. Si
 NIP. 19760604 200112 1 002

PIHAK PERTAMA


TRI MARTINI, S.I. Pust
 NIP. 19800130 200604 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDAH PAJARWATI, A.Md**

Jabatan : **PENGAWAS KEMETROLOGIAN**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **ADI PUTRA, ST.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


ADI PUTRA, ST.M.Si
NIP. 19840610 201001 1 030

PIHAK PERTAMA


INDAH PAJARWATI, A.Md
NIP. 19841109 201001 2 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	%	20,43
	Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	%	76,58


Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	0
	1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp.	0
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	0
		Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	0

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

PIHAK PERTAMA


INDAH PAJARWATI, A.Md
NIP. 19841109 201001 2 026



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SYAIPUL AMRI, ST**

Jabatan : PENERA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **ADI PUTRA, ST.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

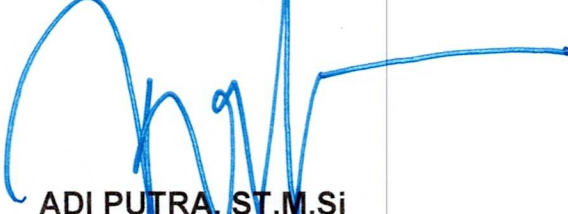
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


ADI PUTRA, ST, M.Si
NIP. 19840610 201001 1 030

PIHAK PERTAMA



SYAIPUL AMRI, ST
NIP. 19840714 201503 1 002

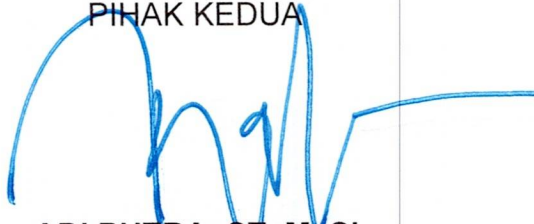
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,74
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	%	20,43
	Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	%	76,58


Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	0
		1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp.	0
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	0
			Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	0

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA


ADI PUTRA, ST, M.Si
 NIP. 19840617 201001 1 030

PIHAK PERTAMA


SYAIPUL AMRI, ST
 NIP. 19840714 201503 1 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fridarson, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Paisal, SKM, MARS

Jabatan : Wali Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024



PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS



PIHAK PERTAMA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20,00 %
		Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %
		Capaian Pelayanan tera/tera ulang kemetrologian	20,43 %
		Capaian pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrologian	76,58 %

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu		
Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %
Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.380.894.573,00	APBD
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp. 55.000.000,00	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 3.213.155.375,00	APBD
4	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 233.779.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 158.000.000,00	APBD
6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 343.624.500,00	APBD
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp. 180.946.900,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 11.565.400.348,00	APBD

Dumai, 23 September 2024



PIHAK KEDUA

H. RAISAL, SKM, MARS



PIHAK PERTAMA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fazrul Basri, S. Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fridarson, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan		
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan		
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	100%
Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.380.894.573,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 119.253.575,00	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 56.867.775,00	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10.000.000,00	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.000.000,00	APBD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Rp. 10.430.100,00	APBD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 10.133.900,00	APBD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 10.886.200,00	APBD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.935.600,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.619.360.048,00	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.606.906.148,00	APBD
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 7.453.900,00	APBD
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 5.000.000,00	APBD

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	10.000.000,00	APBD
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	5.000.000,00	APBD
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	2.000.000,00	APBD
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	3.000.000,00	APBD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	80.000.000,00	APBD
1.4..1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	10.000.000,00	APBD
1.4..2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	70.000.000,00	APBD
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	614.435.576,00	APBD
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	19.991.200,00	APBD
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	83.308.900,00	APBD
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	100.681.500,00	APBD
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	40.000.000,00	APBD
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	40.000.000,00	APBD
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	7.000.000,00	APBD
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	323.453.976,00	APBD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	150.000.000,00	APBD
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	150.000.000,00	APBD
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.382.459.174,00	APBD
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1.200.000,00	APBD
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	740.795.174,00	APBD
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	640.464.000,00	APBD
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	405.386.200,00	APBD
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	26.500.000,00	APBD
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	180.000.000,00	APBD
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	20.000.000,00	APBD

1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	178.886.200,00	APBD
-------	--------------------------------------------------------------	-----	----------------	------

JUMLAH

Rp. 7.380.894.573,00 APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA



FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Kurniasary, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fridarson, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

NOVA KUNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20,00 %
		Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %
	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa mandiri		
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok	100 %

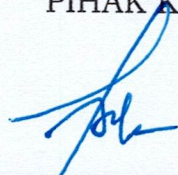
	Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Masyarakat dan Barang Penting	
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	20.000.000,00	APBD
1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	20.000.000,00	APBD
1.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	20.000.000,00	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	3.213.155.375,00	APBD
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	3.127.738.675,00	APBD
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	3.127.738.675,00	APBD
2.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	85.416.700,00	APBD
2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	50.000.700,00	APBD
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	35.416.000,00	APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	233.779.000,00	APBD
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	34.890.000,00	APBD
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	34.890.000,00	APBD
3.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Rp.	198.889.000,00	APBD

3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	99.984.000,00	APBD
3.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	98.905.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	180.946.900,00	APBD
4.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	180.946.900,00	APBD
4.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	97.117.000,00	APBD
4.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	83.829.900,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	3.647.881.275,00	APBD

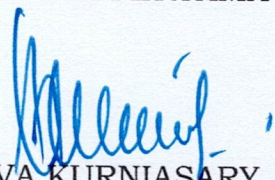
Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA



NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wan Sudirman, ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fridarson, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar
Program			
		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp. 35.000.000,00	APBD
1.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal)	Rp. 35.000.000,00	APBD
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp. 35.000.000,00	APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 158.000.000,00	APBD
2.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 158.000.000,00	APBD

2.1.1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp.	158.000.000,00	APBD
-------	-----------------------------------------	-----	----------------	------

JUMLAH		Rp.	193.000.000,00	APBD
---------------	--	------------	-----------------------	-------------


Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FRIDARSON, SH, M. Si
NIP. 19641005199303 1 006

PIHAK PERTAMA



WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADI PUTRA , ST.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FRIDARSON, SH., M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

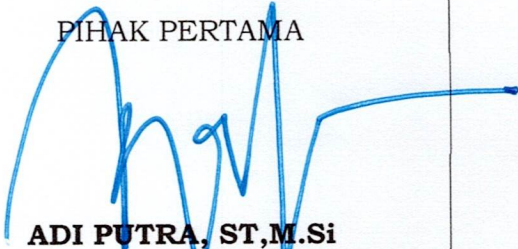
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


FRIDARSON, SH., M.Si
NIP. 19641005 199303 1 006

PIHAK PERTAMA


ADI PUTRA, ST.M.Si
NIP. 19840610 201001 1 030

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
2	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74
3	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,43
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	76,58

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 343.624.500,-	APBD
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	RP 343.624.500,-	APBD
1.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 273.990.500,-	APBD
1.1.2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 69.634.000,-	APBD

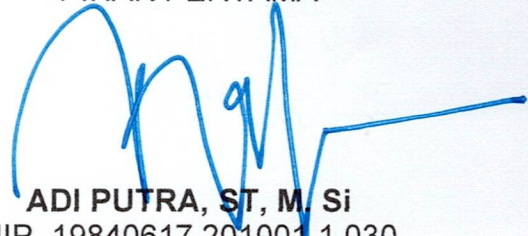
Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FRIDARSON, SH., M.Si
NIP. 19641005 199303 1 006

PIHAK PERTAMA



ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Kesuma Irsanti, S. Sos, M. Si

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fazrul Basri, S. Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

PIHAK PERTAMA


WINDA KESUMA IRSANTI, S. Sos, M. Si
NIP. 19780119 200604 2 014

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan		
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan		
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	100%
Program			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.642.280.950,00	APBD
1.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,00	APBD
1.1.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.000.000,00	APBD
1.1.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 2.000.000,00	APBD
1.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 3.000.000,00	APBD
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 80.000.000,00	APBD
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 10.000.000,00	APBD
1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 70.000.000,00	APBD
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 614.435.576,00	APBD
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 19.991.200,00	APBD
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 83.308.900,00	APBD
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 100.681.500,00	APBD
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 40.000.000,00	APBD

1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	40.000.000,00	APBD
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	7.000.000,00	APBD
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	323.453.976,00	APBD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	150.000.000,00	APBD
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	150.000.000,00	APBD
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.382.459.174,00	APBD
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1.200.000,00	APBD
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	740.795.174,00	APBD
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	640.464.000,00	APBD
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	405.386.200,00	APBD
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	26.500.000,00	APBD
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	180.000.000,00	APBD
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	20.000.000,00	APBD
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	178.886.200,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	2.642.280.950,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002


WINDA KESUMA IRSANTI, S. Sos, M. Si
NIP. 19780119 200604 2 014

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maiyetnita

Jabatan : Pengawas Perdagangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nova Kurniasary, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

MAIYETNITA
NIP. 19700516 199003 2 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20,00 %
		Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %
	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu		
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok	100 %

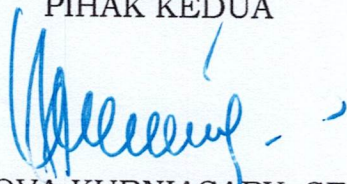
	Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Masyarakat dan Barang Penting	
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	00,00	APBD
1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
1.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	00,00	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	00,00	APBD
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	00,00	APBD
2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	00,00	APBD
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	00,00	APBD
3.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Rp.	00,00	APBD

3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	00,00	APBD
4.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	00,00	APBD
4.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
4.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	00,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

PIHAK PERTAMA



MAIYETNITA
NIP. 19700516 199003 2 003

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuti Hasrianti, S.IP

Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nova Kurniasary, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

TUTI HASRIANTI, S.IP
NIP. 197702272001122 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20,00 %
		Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %
	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu		
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok	100 %

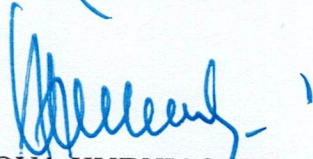
	Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Masyarakat dan Barang Penting	
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	00,00	APBD
1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
1.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	00,00	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	00,00	APBD
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	00,00	APBD
2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	00,00	APBD
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	00,00	APBD
3.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Rp.	00,00	APBD

3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	00,00	APBD
3.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	00,00	APBD
3.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	00,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

PIHAK PERTAMA



TUTI HASRIANTI, S.IP
NIP. 197702272001122 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwanti, S.Sos

Jabatan : Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wan Sudirman, ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA

MARWANTI, S.Sos
NIP. 19750301200212 2 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp. 35.000.000,00	APBD
1.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal)	Rp. 35.000.000,00	APBD
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp. 35.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 35.000.000,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA



MARWANTI, S.Sos
NIP. 19750301200212 2 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmayanti, S.Ag, M.IP

Jabatan : Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wan Sudirman, ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA

ASMAYANTI, S.Ag, M.IP
NIP. 19750318200604 2 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 158.000.000,00	APBD
1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 158.000.000,00	APBD
1.1.1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp. 158.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 158.000.000,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



WAN SUDIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19781027200904 1 001

PIHAK PERTAMA



ASMAYANTI, S.Ag, M.IP
NIP. 19750318200604 2 009

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frans Setiawan, S.Sos

Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nova Kurniasary, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

FRANS SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19810331 200604 1 013

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74%
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan berdasarkan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Rp.6370,72 Milyar
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20,00 %
		Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %
	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu		
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok	100 %

	Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Masyarakat dan Barang Penting	
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	00,00	APBD
1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
1.1.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	00,00	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	00,00	APBD
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	00,00	APBD
2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	00,00	APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	00,00	APBD
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	00,00	APBD
3.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Rp.	00,00	APBD

3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
3.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	00,00	APBD
4.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	00,00	APBD
4.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
4.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	00,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	00,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 197211022006042 011

PIHAK PERTAMA

FRANS SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19810331 200604 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NURSAL FIRTI , ST**

Jabatan : PENERA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADI PUTRA, ST.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ADI PUTRA, ST.M.Si

NIP. 19840610 201001 1 030

PIHAK PERTAMA

NURSAL FITRI , ST

NIP. 19780903 200903 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
2	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74
3	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,43
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	76,58

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
1.1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	APBD
1.1.2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	0	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

PIHAK PERTAMA



NURSAL FITRI, ST
NIP. 19780903 200903 1 004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Marliza, SE, MM

Jabatan : Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas
Perdagangan Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fazrul Basri, S. Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

PIHAK PERTAMA


YULI MARLIZA, SE, MM
NIP. 19820325 200502 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan		
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan		
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.738.613.623,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	119.253.575,00	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	56.867.775,00	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	10.000.000,00	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	10.000.000,00	APBD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Rp.	10.430.100,00	APBD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.	10.133.900,00	APBD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	10.886.200,00	APBD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10.935.600,00	APBD

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.619.360.048,00	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.606.906.148,00	APBD
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	7.453.900,00	APBD
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	5.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	4.738.613.623,00	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FAZRUL BASRI, S. Si
NIP. 19760604 200112 1 002

PIHAK PERTAMA



YULI MARLIZA, SE, MM
NIP. 19820325 200502 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDAH PAJARWATI, A.Md**

Jabatan : PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **ADI PUTRA, ST.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ADI PUTRA, ST.M.Si
NIP. 19840610 201001 1 030

PIHAK PERTAMA

INDAH PAJARWATI, A.Md
NIP. 19841109 201001 2 026

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,43
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	76,58

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
1.1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	APBD
1.1.2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	0	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


VADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

PIHAK PERTAMA


INDAH PAJARWATI, A.Md
NIP. 19841109 201001 2 026

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2024**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SYAIPUL AMRI, ST**

Jabatan : PENERA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **ADI PUTRA, ST.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ADI PUTRA, ST, M.Si
NIP. 19840610 201001 1 030

PIHAK PERTAMA

SYAIPUL AMRI, ST
NIP. 19840714 201503 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
2	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,74
3	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,43
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	76,58

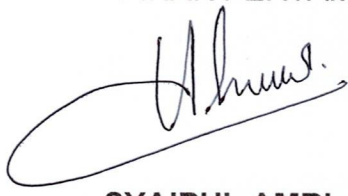
	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
1.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	APBD
1.1.2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	0	APBD

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


ADI PUTRA, ST, M. Si
NIP. 19840617 201001 1 030

PIHAK PERTAMA


SYAIPUL AMRI, ST
NIP. 19840714 201503 1 002

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Perdagangan Kota Dumai

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$PDRB_n + 0,1\% (PDRB_n)$	14,74%	14,43%	97,90%
		Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut pengeluaran	$(Data\ BPS) + 0,5\% (Data\ BPS)$	6.370,72 Milyar	7.775,00 Milyar	122,04%
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	Jumlah unit terlayani / Potensi UTTP x 100%	20,43%	21,63%	105,87%
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	Jumlah pemilik UTTP yang diawasi atau dilakukan penyuluhan / Potensi Pemilik UTTP x 100%	76,58%	137,39%	179,41%
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	Jumlah pedagang yang dipromosikan / 100 pedagang yang di data	14,62%	13,67%	93,51%
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	Jumlah kelompok pedagang yang di Bina / Jumlah Pasar Pemerintah	20%	19%	95%
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Jumlah Pengawasan Kecamatan yang di pantau / Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Dumai	100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Jumlah Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Dumai**

Uraian Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.394.394.573	6.360.772.314	86,03
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.253.575	99.169.950	83,16
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.867.775	55.461.600	97,53
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	5.774.600	57,75
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	5.577.950	55,78
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.430.100	7.706.800	73,89
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.133.900	6.804.200	67,14
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.886.200	8.754.400	80,42
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.935.600	9.090.400	83,13
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.619.360.048	4.313.786.753	93,39
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.606.906.148	4.302.285.633	93,39
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.453.900	7.230.900	97,01
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.270.220	85,40
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	4.017.200	40,18
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	694.000	13,88
	2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.823.200	91,16
	3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	1.500.000	50,00
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	79.999.990	100
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	9.999.990	100
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	70.000.000	100
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.435.576	472.046.991	76,83
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.200	14.535.000	72,71
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.308.900	69.375.500	83,28
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.681.500	51.498.000	51,15
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	28.050.000	70,13
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	29.967.000	74,92
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	5.350.000	76,43
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.453.976	273.271.491	84,49
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	147.570.000	98,38
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	147.570.000	98,38
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.395.959.174	1.040.643.327	74,55
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	740.795.174	457.233.655	61,72
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.964.000	582.209.672	89,03
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.386.200	203.538.103	50,21
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.500.000	20.000.000	75,47
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	159.458.103	88,59
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.930.000	99,65
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.886.200	4.150.000	2,32
2		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.000.000	46.840.000	85,17
	1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengembasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	20.000.000	12.280.000	61,40
	1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20.000.000	12.280.000	61,40
	2	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	35.000.000	34.560.000	98,75
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	35.000.000	34.560.000	98,74
3		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.458.155.375	2.614.064.013,92	75,60
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.372.738.675	2.545.231.813,92	75,47
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.372.738.675	2.545.231.813,92	75,46
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	85.416.700	68.832.200	80,59
	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.700	37.830.300	75,66
	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.416.000	31.001.900	87,54
4		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.779.000	131.327.550	56,18
	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	34.890.000	13.623.000	39,05
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.890.000	13.623.000	39,05
	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	198.889.000	117.704.550	59,19
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	99.984.000	79.313.550	79,33
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	98.905.000	38.391.000	38,82
5		Program Pengembangan Ekspor	158.000.000	150.499.400	95,26
	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	158.000.000	150.499.400	95,26

	1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	158.000.000	150.499.400	95,25
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		343.624.500	307.111.384	89,38
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	343.624.500	307.111.384	89,38
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	273.990.500	239.682.083	87,48
	2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	69.634.000	67.429.301	96,83
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		180.946.900	142.369.840	78,68
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	180.946.900	142.369.840	78,68
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	97.117.000	91.401.200	94,11
	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	83.829.900	50.968.640	60,80
			11.823.900.348	9.752.984.501,92	82,49

Dumai, Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Kota Dumai



SYAHRINALDI, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681025 199002 1 001